MUHAMMAD FUAD

Kebudayaan dan Perubahan Sosial dalam Tinjauan Teori*

Angan-angan bahwa kebudayaan mampu memainkan peranan yang menentukan pada saat-saat kritis bukanlah angan-angan baru. Angan-angan itu tidak pernah lekang dimakan waktu. Dalam konteks Eropa dan Amerika, angan-angan itu ditemukan dalam tradisi pemikiran baik liberal maupun Marxian. Para pemikir dalam kedua tradisi itu tidak pernah setengah hati dalam memberikan peran kepada kebudayaan dalam proses perubahan sosial, meskipun mereka tidak memberi bobot yang sama kepada peran kebudayaan tersebut. Para pemikir tradisi liberal cenderung tidak pernah menyangsikan peran kebudayaan. Namun para pemikir tradisi Marxian melihat peran kebudayaan dalam kaitannya dengan peranan perekonomian yang mereka lihat juga memainkan peran yang tidak kalah besar dengan kebudayaan.

Tulisan ini merupakan tinjauan konsep-konsep tentang peranan kebudayaan dalam perubahan sosial dalam tradisi pemikiran Marxian. Fokusnya adalah pemikiran Mazhab Frankfurt sebagai satu versi pemikiran Neo-Marxian dan pemikiran pascamodernisme, tetapi pada awalnya akan dibandingkan dengan singkat pemikiran tradisi liberal dengan Mathew Arnold dan T. S. Eliot sebagai wakilnya. Sebelum memasuki pembicaran tentang pemikiran Mazhab Frankfurt dan pascamodernisme, sekilas akan dilihat gagasan pokok Karl Marx tentang proses perubahan sosial. Hal ini perlu karena gagasan Marx merupakan bagian penting dari landasan kedua tradisi pemikiran tersebut. Tradisi pemikiran Neo-Marxian mengembangkan gagasan Marxian yang tidak lagi memadai untuk menjelaskan perkembangan sistem kapitalisme di negara negara maju, sedangkan pemikiran pascamodernisme muncul

* Tulisan ini semula merupakan makalah yang disampaikan dalam Simposium Visi Reformasi Berwawasan Menuju Abad Ke-21, diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia; Depok 1 – 3 Desember 1998.

sebagai kritik keras yang menolak pokok-pokok pemikiran Marxian dan menggantikannya dengan yang baru.

Ada pelajaran yang bisa dipetik dari pemikiran-pemikiran tersebut untuk melihat proses reformasi di Indonesia dewasa ini. Seperti tradisi Mazhab Frankfurt, visi tentang masyarakat ideal perlu terus dipertahankan. Rakyat Indonesia perlu terus berusaha mengembangkan konsepnya sendiri tentang masyarakat yang ideal, atau paling tidak yang lebih baik, untuk memberi arah umum pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam pemikiran Mazhab Frankfurt, kebudayaan bisa memainkan peran besar dalam proses pembangunan suatu demokrasi. Namun konsep kebudayaan yang ditawarkannya justru cenderung membatasi kemungkinan-kemungkinan peran tersebut.

Dalam hal ini, konsep kebudayaan dalam pemikiran pascamodernisme menciptakan ruang gerak yang jauh lebih fleksibel. Konsep ini memberi ruang kepada individu-individu dan hampir semua pihak dalam masyarakat untuk memberi andil dan dampak yang berarti dalam proses perubahan. Konsep ini juga melihat kemungkinan bahwa perubahan bisa dimulai tidak hanya berada dari satu tempat tertentu dalam masyarakat. Awal perubahan bisa datang dari titik yang manapun dalam tubuh masyarakat. Pandangan seperti ini memperbanyak kemungkinan pendekatan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan. Kesempatan untuk lebih banyak orang untuk berperan serta pun menjadi lebih terbuka.

Mathew Arnold, pendekar kebudayaan adiluhung dari Inggris, berpandangan bahwa agama Kristen telah berperan sebagai kekuatan perekat integrasi Eropa selama berabad-abad. Ketika terjadi perubahan sosial pada paruh kedua abad ke-19, yang ditandai dengan munculnya masyarakat kapitalis, Arnold melihat bahwa agama Kristen terdesak dari perannya tersebut. Hatinya menjadi galau, bukan karena pudarnya agama Kristen tetapi karena kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya disintegrasi Eropa bila kekuatan perekat pengganti tidak cepat-cepat ditemukan. Dalam pandangannya, kebudayaanlah yang pantas dan mampu memainkan peran tersebut. Yang dimaksud Arnold dengan kebudayaan bukanlah sembarang kebudayaan, tetapi kebudayaan adiluhung, yaitu puncak-puncak peradaban yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa Eropa.¹

Kurang lebih lima puluh tahun kemudian krisis kembali melanda Eropa sebagai akibat Perang Dunia I. Tampil seorang pemikir liberal lain, yaitu

¹ Uraian tentang Mathew Arnold dan T. S. Eliot dirangkum dari studi West (1993).

Thomas Stearns Eliot, yang mengatakan bahwa Eropa telah berubah menjadi "negeri porak poranda". Bagi Eliot, selain disintegrasi Eropa, kemungkinan tenggelamnya Eropa sebagai pusat kebudayaan adiluhung, sebagai tempat puncak-puncak peradaban manusia diwujudkan, juga sangat merisaukan. Seperti Arnold, Eliot berpendapat bahwa kebudayaanlah yang bisa membawa Eropa keluar dari jurang kehancuran. Baginya kebudayaan berarti tradisi. Eliot tidak ingin kembali ke masa lampau, tetapi ia ingin membangun suatu konstruksi kebudayaan baru dengan menggali, menghidupkan kembali, dan merevisi nilai-nilai adiluhung yang pernah berkembang dalam tradisi Eropa. Ia menemukan nilai-nilai itu dalam tradisi keagamaan dan dalam tradisi sastra dan budaya sekuler. Dengan cara ini, ia mengharapkan Eropa akan bangkit lagi dan tetap berjaya. Namun Eropa kurang begitu beruntung, satu perang dunia lagi membawa badai yang lebih dahsyat, yang menghabisi zaman keemasannya. Setelah itu kiblat kebudayaan dunia berpindah ke Amerika Serikat, negeri sempalan Eropa yang ada di seberang lautan.

Pemikir-pemikir liberal seperti Arnold dan Eliot tidak pernah meragukan kemampuan kebudayaan sebagai kekuatan utama penopang dan pembentuk suatu masyarakat. Kecenderungan pemikiran seperti itu dapat ditemukan dalam studi Smith (1956) yang sekarang dianggap sebuah karya klasik dalam tradisi penulisan sejarah kebudayaan Amerika. Dalam mempelajari sejarah Amerika abad ke-19 Smith mendasarkan pada asumsi akan peran kebudayaan. Ia menggambarkan bahwa seluruh dinamika sejarah Amerika digerakkan dan diarahkan oleh mitos "Imperium Amerika" yang mengatakan bahwa kejayaan Amerika akan terwujud dalam proses penaklukan wilayah Barat. Mitos ini telah membawa perkembangan sejarah Amerika sampai pada penaklukan pantai Kalifornia yang menjadi batas benua Amerika di barat.

Pemikiran Smith telah banyak dikritik, di antaranya karena asumsi tentang peranan kebudayaan yang mendasarinya tersebut. Bagaimana mungkin dinamika ekonomi yang begitu kuat—yang diuraikan secara luas oleh Smith sendiri dalam bukunya tersebut—tidak memainkan peranan yang lebih menentukan dalam perkembangan sejarah Amerika? Kritik terhadap buku Smith seperti itu didasari oleh tradisi pemikiran Marxian. Dalam tradisi pemikiran itu, peranan kebudayaan dalam proses perubahan sosial tidak dipandang secara sederhana. Artinya, setiap proses perubahan sosial dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi antara kekuatan budaya dan kekuatan ekonomi. Pemikiran itu ditemukan dalam aliran Neo-Marxian. Namun sebelum memeriksa dengan lebih seksama gagasan dalam aliran itu perlu disimak gagasan Karl Marx yang relevan, yaitu pemikirannya tentang tatanan bawah dan tatanan atas dan kaitan antara keduanya.

Dalam pemikiran Marx, unsur-unsur tatanan bawah terdiri dari modal, tenaga kerja, dan alat produksi. Dalam sistem kapitalis, di antara unsur-unsur itu yang terpenting adalah modal. Menurut Marx, modal adalah motor segalanya. Modal memungkinkan penguasaan alat produksi dan tenaga kerja. Modal mentransformasikan tenaga kerja dan alam menjadi komoditi. Modal, dalam berkompetisi, mendorong baik inovasi teknologi yang berakibat efisiensi alat produksi maupun penciptaan sistem yang merangsang peningkatan produktivitas tenaga kerja. Inovasi teknologi dan peningkatan produksi komoditi—atau transformasi tenaga kerja dan alam menjadi barang konsumsi—terjadi secara terus menerus dan berjalan semakin cepat sehingga mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan-perubahan dalam wilayah ekonomi ini selanjutnya membawa berbagai perubahan dalam wilayah kebudayaan—sistem nilai, pandangan hidup, agama, dan lain-lain. Karena modal bisa bergerak melewati batas-batas negara dan budaya, mekanisme perubahan ekonomi sosial, dan budaya menjadi universal sifatnya (Callinicos 1990).

Tradisi pemikiran yang kemudian berkembang dan masih setia kepada pemikiran Marx ini sering disebut sebagai tradisi Marxian Ortodoks. Sementara itu, tradisi Neo-Marxian merupakan perkembangan lebih jauh yang boleh dikatakan sebagai kritik terhadap pemikiran Marxian Ortodoks. Di sini akan dibicarakan satu versi pemikiran Neo-Marxian, yaitu yang terkait dengan Mazhab Frankfurt. Dalam pemikiran Mazhab Frankfurt ditemukan analisis tentang kebudayaan massa dalam masyarakat industri maju yang cenderung menjadi kekuatan yang resisten terhadap perubahan. Tradisi Neo-Marxian mewarisi cita-cita terbentuknya masyarakat ideal dalam bentuk sosialisme yang ada dalam pemikiran Marxian Ortodoks. Namun ia menolak gagasan bahwa kelas pekerja bisa diharapkan menjadi agen perubahan.

Cita-cita terbentuknya masyarakat ideal dalam bentuk sosialisme merupakan gagasan yang selalu melandasi pembicaraan tentang perubahan dalam tradisi Marxian. Perubahan berarti perubahan dari keadaan yang sedang berlangsung, yaitu sistem kapitalisme, menuju sosialisme yang dicita-citakan. Sistem kapitalisme sebagai sistem yang sedang berlangsung harus diubah karena dianggap sebagai sistem yang dilandasi oleh hubungan produksi yang tidak adil, yaitu eksploitasi kelas buruh oleh kelas pemilik modal. Marx mengharapkan kelas buruh, sebagai kelas yang tertindas, akan menjadi agen atau pelaku yang memulai proses perubahan setelah menjadi sadar akan eksploitasi diri mereka. Kelas buruh yang telah sadar ini akan berjuang untuk mengambil alih kepemilikan alat produksi dan mengakhiri

hubungan produksi yang eksploitatif. Perubahan dalam tatanan bawah ini akan memulai proses perubahan menyeluruh yang mencakup tatanan atas.

Harapan yang tertaruh di pundak kelas pekerja inilah yang ditinggalkan oleh para pemikir Neo-Marxian. Alasan mereka tidak lagi berharap kepada kelas pekerja adalah kenyataan bahwa sistem kapitalisme, seperti terlihat di negara-negara maju, berkembang semakin kuat dari waktu ke waktu. Ketika mereka menyelidiki rahasia perkembangan ini dan sebab-sebab kelas pekerja tak kunjung bangkit seperti yang diharapkan, analisis mereka menunjukkan bahwa kelas kapitalis tidak hanya menguasai modal dan alat produksi tetapi juga memproduksi ideologi yang mampu meninabobokan bukan hanya kelas pekerja tetapi juga hampir seluruh masyarakat.

Dalam pemikiran Mazhab Frankfurt, ideologi kapitalis di negara maju menyatu dengan kebudayaan massa dalam bentuk barang-barang konsumsi yang diproduksi dan dikonsumsi secara masal.² Produksi masal ini dimungkinkan oleh teknologi tinggi, yaitu alat produksi sistem kapitalis masyarakat maju. Produksi masal membuat barang-barang konsumsi murah sehingga bisa diperoleh dan dinikmati semua orang. Di sinilah persatuan antara ideologi kapitalis dengan kebudayaan massa terjadi. Kebudayaan massa, dalam bentuk barang-barang konsumsi, adalah wujud nyata dari kemakmuran yang dijanjikan oleh ideologi kapitalis. Sebaliknya karena kemakmuran yang mereka berikan, barang-barang konsumsi ini menyerap dan memperoleh kekuatan ideologis, bahkan akhirnya mereka mengalami transformasi menjadi ideologi kapitalis itu sendiri.

Kebudayaan massa ideologis itu menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa sistem yang ada merupakan yang terbaik, yang telah terbukti kebaikannya, dan karena itu harus dipertahankan. Di samping itu, kebudayaan massa ideologis kapitalis juga memiliki watak barang konsumsi produksi masal yaitu memberi hiburan dan kesenangan, yang cenderung mematikan jiwa kritis masyarakat dan tidak menumbuhkan visi tentang kebebasan dan pembebasan. Kesadaran yang tidak kritis, yang beranggapan bahwa sistem kapitalis merupakan yang terbaik dan harus dipertahankan inilah yang dalam pemikiran Mazhab Frankfurt disebut kesadaran palsu. Kesadaran palsu menutup kemungkinan tumbuhnya kesadaran revolusioner pada diri kelas pekerja, yaitu kesadaran yang bisa membangkitkan mereka untuk menjadi agen perubahan. Bahkan seluruh anggota masyarakat, dalam pemikiran Mazhab Frankfurt, terbelenggu oleh kesadaran palsu. Hanya kaum

² Generalisasi tentang Mazhab Frankfurt dalam tulisan ini didasarkan pada data yang sangat terbatas yaitu buku Marcuse (1964) dan satu bab dari Horkheimer dan Adorno (1982).

intelektual yang mampu lepas dari belenggu itu, dan karena itu hanya mereka yang bisa diharapkan menjadi motor perubahan.

Meskipun demikian, dari kaum intelektual pun, dalam pandangan Mazhab Frankfurt, hanya sedikit yang bisa diharapkan untuk menjadi motor perubahan. Sebagian besar dari mereka, baik yang bekerja di sektor swasta, pemerintahan maupun yang berkecimpung di dunia akademik, dengan sadar ikut mendukung sistem yang ada. Mereka membantu melestarikan kesadaran palsu pada masyarakat luas. Dari sedikit intelektual tersebut, yang masih bisa diharapkan memiliki kesadaran dan komitmen untuk memperjuangkan sistem pengganti adalah para filsuf dan seniman. Filsuf selalu bergelut dengan filsafat, suatu wacana yang cenderung untuk memutarbalikkan fakta dan membicarakan hal-hal yang transenden. Begitu juga seni yang menawarkan dunia lain yang bisa menjadi alternatif dari sistem yang ada dan yang menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang ideal. Dengan demikian, filsafat dan seni selalu mengandung wawasan kritis dan subversif yang bisa menjadi kekuatan yang bisa mengawali proses perubahan.

Secara ringkas, dalam pemikiran Mazhab Frankruff, kebudayaan dilihat sebagai kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan politik. Namun terlihat juga bahwa kebudayaan dalam tradisi pemikiran ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan massa dan kebudayaan tinggi atau adiluhung. Kebudayaan massa merupakan kekuatan yang cenderung melestarikan keadaan dengan berfungsi sebagai ideologi yang meninabobokan, sedangkan kebudayaan adiluhung adalah kekuatan yang cenderung mendesakkan perubahan. Berkaitan dengan perbedaan kebudayaan ke dalam dua kategori ini ada kemiripan pandangan antara Mazhab Frankfurt dengan pandangan pemikiran liberal. Dalam pemikiran Arnold dan Eliot kebudayaan rakyat-banyak sering mereka identikkan dengan barbarisme yang cenderung merusak.

Pemikiran bahwa kebudayaan bisa menjadi kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perubahan sosial dan politik ini diperkuat oleh pemikiran yang sering dikaitkan dengan pascamodernisme, yaitu gagasan tentang wacana sebagai kekuasaan.³ Dalam pemikiran pascamodernisme, wacana adalah bentuk kebudayaan yang berupa pernyataan-pernyataan tentang kebenaran, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan atau kekuatan untuk membuktikan

³ Pembahasan tentang pascamodernisme dalam tulisan ini didasarkan pada dua buku Foucault (c. 1977) dan (c. 1980) dan satu buku Lyotard (1988).

kebenaran wacana yang ditandai dengan adanya efek kebenaran. Sekilas gagasan tentang wacana sebagai kekuasaan ini mirip dengan gagasan Mazhab Frankfurt tentang ideologi kapitalis yang kebenarannya telah terbukti oleh produksi barang konsumsi secara masal berkat kekuatan teknologi maju. Namun wacana pascamodern tidak sama dengan ideologi. Ideologi berbicara tentang kebenaran besar dan luhur, kebenaran ideal yang dicita-citakan; sedangkan wacana berbicara tentang kebenaran di depan mata dalam segala aspek kehidupan. Pengakuan seorang pesakitan yang dituduh mencuri ayam adalah wacana karena dia adalah pernyataan yang menimbulkan efek kebenaran, yang memberi membenaran bagi pelaksanaan kekuasaan hukum.⁴

Pemusatan perhatian pada wacana dalam pemikiran pascamodernisme ini berakibat buyarnya perbedaan antara kebudayaan adiluhung dan kebudayaan massa atau kebudayaan rakyat. Ini merupakan butir lain berpisahnya pemikiran pascamodern dari pemikiran Neo-Marxian. Di sini pemikiran pascamodern juga berpisah dari tradisi liberal yang juga meyakini peran luhur kebudayaan adiluhung dan cenderung memandang kebudayaan massa bersifat merusak.

Untuk lebih mempejelas masalah tersebut perlu dilihat sekilas perkembangan tradisi pemikiran Marxian setelah Mazhab Frankfurt (yang di sini digunakan sebagai contoh satu versi tradisi pemikiran Neo-Marxian). Sampai batas tertentu, dalam kronologi perkembangan tradisi pemikiran Marxian, pemikiran pascamodernisme berada pada tahap perkembangan sesudah Neo-Marxian. Sejarah perkembangan tradisi pemikiran Marxian sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem kapitalisme yang terus menguat dan meluas. Para pemikir Neo-Marxian, karena alasan ini, menanggalkan harapan mereka dari pundak kelas pekerja dan menaruhnya di atas pundak kaum intelektual. Namun harapan besar yang ditaruh di atas pundak kaum intelektual pun, walau mereka dipersenjatai dengan ide dan ideologi yang seharusnya ampuh, tetap tinggal harapan. Usaha mereka tidak juga membuahkan hasil. Sistem kapitalisme tetap tidak bergeming, bahkan terus menguat dan meluas. Ini adalah kenyataan dan masalah besar serta serius yang harus dihadapi oleh para pemikir pascamodernisme.

Para pemikir Neo-Marxian berkesimpulan bahwa kekuatan kunci yang menopang sistem kapitalisme adalah teknologi tinggi dan kebudayaan massa yang hasil produksinya menjelma menjadi ideologi yang meninabobokan seluruh masyarakat. Jadi, bagi mereka, masalah yang harus dihadapi berada di dalam diri sistem kapitalis sendiri. Dalam arti ini para pemikir Neo-

⁴ Contoh ini diambil dari Foucault (c. 1977)

Marxian masih setia kepada gagasan pokok Marx. Bagi para pemikir pascamodern, masalahnya lain sama sekali. Bagi mereka masalahnya terletak justru pada cara tradisi Marxian memandang kapitalisme. Menurut mereka, cara pandang inilah yang harus dirombak, bahkan lebih dari itu—ini yang bersumber dari konsep-konsep dasar Marxian—harus ditanggalkan dan diganti dengan yang baru.

Konsep kekuasaan adalah konsep baru yang diajukan oleh para pemikir pascamodern. Konsep ini sekaligus dipakai untuk menolak konsep-konsep dasar Marxian. Yang paling pokok adalah konsep “tatanan-bawah-tatanan atas” dan konsep masyarakat ideal atau sosialisme. Penolakan atas konsep-konsep ini menimbulkan akibat-akibat tertentu.

Akibat dari penolakan konsep tatanan-bawah-tatanan-atas adalah hilangnya, dalam pemikiran pascamodern, gagasan monopoli kekuatan yang memungkinkan terjadinya perubahan keadaan oleh kelas atau kelompok tertentu. Marx berpandangan bahwa kekuasaan dan kekuatan dimiliki oleh kelas kapitalis dan pada waktunya akan berpindah tangan kepada kelas pekerja, yaitu dengan berpindahnya penguasaan kepemilikan alat produksi. Para pemikir Neo-Marxian tidak lagi berharap dari kelas pekerja tetapi dari kaum intelektual yang menguasai produksi ideologi. Meskipun ada perbedaan, kedua pemikiran itu didasari konsep tatanan-bawah-tatanan-atas. Dengan tiadanya konsep ini dalam pemikiran pascamodernisme, tidak ada lagi konsep kelas di dalamnya. Kekuasaan dan kekuatan bisa dimiliki oleh siapa saja, baik individu maupun kelompok. Wacana dan kebudayaan bisa diproduksi oleh siapa saja, baik individu maupun kelompok.

Akibat lebih jauh dan ditolaknyanya konsep tatanan-bawah-tatanan-atas adalah hilangnya hak-hak istimewa yang diberikan kepada kebudayaan adiluhung. Sudah diketahui bahwa kecenderungan pemberian hak istimewa kepada kebudayaan adiluhung sebagai penyandang kekuatan pengubah keadaan—oleh karena itu bernilai tinggi—dilakukan oleh para pemikir liberal maupun Neo-Marxian. Para pemikir Neo-Marxian juga memandang kebudayaan massa sebagai kekuatan reaksioner yang cenderung mempertahankan keadaan—karena itu tidak bernilai. Dalam pemikiran pascamodernisme, perbedaan ini tidak relevan. Keduanya adalah kebudayaan, wacana, dan kekuasaan. Sebagai kekuasaan, keduanya berpotensi sebagai kekuatan pengubah maupun pelestari keadaan, keduanya berpotensi sebagai pembebas dan peninabobo. Dengan adanya kemampuan produksi wacana/kebudayaan/kekuasaan pada diri setiap individu dan setiap kelompok, maka perubahan bisa datang dari semua arah di dalam masyarakat. Kemungkinan arah perubahan pun tidak terbatas.

Hal itu tidak berarti bahwa dalam pemikiran pascamodernisme kekuasaan tersebar rata dalam masyarakat. Penggalangan kekuasaan oleh individu atau kelompok selalu terjadi yang bisa menyebabkan penumpukan kekuasaan dan kekuatan di tempat tertentu. Namun yang ditekankan adalah bahwa setiap individu tidak pernah dalam keadaan tak berkekuatan atau tak berdaya sama sekali. Hal ini berarti bahwa benturan antarkekuatan juga terjadi antarindividu dan antarkelompok, bukan hanya antarkelas seperti dalam pandangan Marx. Karena itu, kekuatan dalam konsep pascamodernisme disebut "micropower".

Hal itu juga terkait dengan penolakan konsep sosialisme Marxian. Seperti telah disebutkan, perubahan dalam tradisi Marxian berarti perubahan dari keadaan yang ada, yaitu sistem kapitalisme, ke keadaan yang dicita-citakan, yaitu sosialisme. Dalam tradisi pemikiran Marxian, sosialisme adalah keadaan ideal yang tidak atau belum terwujudkan. Keadaan yang ada, atau sistem kapitalisme, adalah keadaan yang tidak diinginkan; sosialisme adalah keadaan yang dicita-citakan. Karena itu sosialisme bersifat transenden yang tidak terwujud selama keadaan yang ada masih bercokol. Dikotomi ini sebenarnya juga didasari oleh konsep tatanan-bawah-tatanan-atas. Dengan penolakan mereka akan konsep ini, para pemikir pascamodernisme juga menolak konsep transenden. Dengan demikian, konsep sosialisme tidak lagi absah bagi mereka. Arah perubahan dalam pemikiran pascamodernisme tidak harus menuju ke sosialisme, tetapi mewujudkan kemungkinan yang tidak terbatas.

Konsep sosialisme mengisyaratkan cita-cita masyarakat ideal tanpa penindasan. Dengan menanggalkan konsep sosialisme para pemikir pascamodern melepaskan kemungkinan adanya masyarakat yang lepas dari penindasan sama sekali. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran pascamodernisme, tidak ada idealisme yang dipejuangkan. Perubahan tidak harus berarti perubahan total dan revolusioner dari satu sistem (kapitalisme) ke sistem pengganti yang sama sekali lain (sosialisme). Benturan antarkekuasaan besar, antara dua sistem seperti kapitalisme dan sosialisme dan ide-ide pendukungnya tidak akan terjadi lagi. Benturan kekuasaan berarti benturan antara kekuasaan atau wacana individu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Perubahan juga berarti perubahan dalam skala kecil. Secara intrinsik, tidak ada perbedaan nilai antara perubahan besar dan kecil. Yang menjadi pusat perhatian para pemikir pascamodernisme adalah penyelidikan mekanisme kerja kekuatan dalam proses-proses dominasi dan pertahanan diri. Dengan demikian, dalam pandangan pascamodernisme, kebudayaan/

wacana/kekuasaan selalu bisa mengubah keadaan tetapi perubahan ini tidak pernah terjadi dalam skala besar. Perubahan tidak pernah terjadi secara total.

Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami pergolakan dan perubahan. Slogannya adalah sedang mengalami reformasi, dan yang diinginkanya reformasi yang total. Adakah pelajaran yang dapat dipetik dari uraian tentang gagasan dan pemikiran kebudayaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan peranannya dalam suatu proses perubahan?

Tradisi pemikiran liberal tidak pernah menyangsikan peranan besar kebudayaan dalam kehidupan manusia, lebih-lebih bagi orang seperti Arnold dan Eliot yang "kebetulan" penyair. Sebagai penyair, tidak syak lagi mereka melihat masalah-masalah kehidupan dalam kerangka perspektif seni, yaitu perspektif yang melihat seni sebagai perpaduan antara bentuk dan isi. Seni adalah bentuk dan kehidupan adalah isi. Seni adalah rancangan yang memberi bentuk kepada kehidupan yang merupakan bahan mentah yang tidak berbentuk dan karena itu tidak bermakna. Seni memberi keindahan, keharmonisan kepada kehidupan. Seni memberi makna kepada kehidupan dengan mengubahnya menjadi komedi atau tragedi. Perspektif seperti ini tampaknya juga dianut kalangan kampus, terutama yang mempelajari masalah humaniora. Perspektif itu dapat mengurangi keraguan mereka akan peran kebudayaan dalam kehidupan yang sering kali menjadi kabur, lebih-lebih pada saat-saat pergolakan seperti gelombang reformasi. Namun sikap hati-hati tetap diperlukan untuk mencermati kecenderungan elitis dari konsep kebudayaan liberal itu.

Penilaian yang hampir sama juga dapat diberikan kepada pemikiran Mazhab Frankfurt. Gagasannya yang menyatakan bahwa filsafat dan seni bisa menjadi pendekar yang memotori perubahan menuju kebaikan juga menarik untuk disimak. Namun pandangan Mazhab Frankfurt juga sangat elitis. Rakyat dilihatnya sebagai massa yang tak berdaya, yang selalu dimanipulasi oleh rezim penguasa. Dalam pandangan Mazhab Frankfurt, pendapat rakyat tidak memiliki keabsahan sehingga tidak bisa diperhitungkan. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan yang tidak berarti dan tidak berguna. Pandangan ini bertentangan dengan asas demokrasi, karena itu perlu ditinggalkan.

Pandangan yang cenderung merendahkan kebudayaan rakyat ini juga menimbulkan pesimisme yang bisa membuat kita kehilangan semangat. Pesimisme Mazhab Frankfurt juga muncul dari pandangan masyarakat yang totalistik. Bagi para pemikir Mazhab Frankfurt perubahan akan memiliki arti jika bersifat total, dari satu sistem ke sistem yang lain, dari kapitalisme ke sosialisme. Jika tidak total maka perubahan itu tidak berarti. Sikap ini

akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perubahan yang seperti itu tidak pernah terjadi. Namun cita-cita akan sosialisme yang terus mereka pertahankan membawa para pemikir Mazhab Frankfurt kepada idealisme yang “menyenangkan”. Idealisme dan cita-cita mereka akan suatu masyarakat ideal bisa digunakan untuk mendukung idealisme masyarakat Indonesia, yaitu cita-cita akan masyarakat demokratis yang tidak diragukan lagi merupakan bentuk masyarakat ideal, atau paling tidak yang lebih baik.

Kini masyarakat Indonesia juga menginginkan reformasi total, tetapi tidak pernah jelas apa yang dimaksud dengan reformasi total. Apakah reformasi yang diinginkan itu berupa pergantian sistem yang lain ke sistem yang baru secara total? Dalam bidang ekonomi tampaknya tidak diinginkan adanya perubahan sistem. Sistem kapitalisme masih disenangi dan dipercaya untuk dikembangkan di Indonesia. Paling tidak sebagian masyarakat Indonesia sudah “telanjur” mengenyam kenikmatan yang direguk dari sistem itu. Banyak orang akan ikut gembira kalau sistem ekonomi kapitalis di Indonesia yang sedang terkilir kakinya sembuh dan berjalan lancar kembali. Jadi, yang dimaksud dengan reformasi sebenarnya adalah perubahan parsial, bukan total, mungkin ditujukan kepada penciptaan sistem redistribusi hasil jerih payah ekonomi sehingga pembagian lebih merata. Termasuk di sini alokasi dana untuk pengembangan kegiatan berbudaya.

Mungkin juga reformasi di Indonesia menginginkan perbaikan dalam bidang politik, menginginkan kebudayaan politik yang lebih demokratis, baik dalam norma maupun tingkah laku. Reformasi itu juga menginginkan masyarakat yang lebih beradab, seperti terungkap dalam pembicaraan tentang masyarakat madani yang ramai akhir-akhir ini. Filsafat dan seni, khususnya sastra, bisa sangat berperan di sini seperti yang dinyatakan dalam pemikiran Mazhab Frankfurt. Dalam hal ini para pekerja budaya—termasuk filsuf, sastrawan dan orang yang belajar dan mengajar ilmu-ilmu humaniora—tidak perlu mengubah kegiatan sehari-harinya, yaitu memproduksi wacana tentang makna kehidupan. Dari situ akan bisa ditarik gagasan-gagasan tentang kehidupan Yang lebih baik, mungkin yang lebih demokratis dan lebih beradab.

Namun berbagai wawasan yang terdapat dalam ilmu-ilmu humaniora dan obyek-obyek kajiannya masih perlu diterjemahkan dalam gerakan sosial. Di sini para pekerja budaya bisa berperan serta ataupun tidak. Dalam hal ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari pemikiran pascamodernisme. Mungkin keputusan para pemikir pascamodernisme untuk meninggalkan proyek besar yang idealis tidak bisa diterima, tetapi gagasan mereka tentang kekuasaan yang bisa mengarah kepada pemberdayaan individu patut

digunakan. Dalam pandangan mereka setiap individu memiliki kekuasaan. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki kemungkinan untuk menimbulkan dampak. Dampak ini mungkin berskala kecil, tetapi tetap bisa sangat berarti. Hal itu bukan hanya karena yang diinginkan dalam reformasi sekarang ini adalah perubahan yang parsial. Terkandung dalam gagasan kepemilikan kekuasaan oleh individu adalah proses perubahan yang bisa dimulai dari individu dan dari hal yang kecil. Perubahan yang kecil pada saatnya bisa menimbulkan dampak dan perubahan yang besar.

Kerangka berpikir makro merupakan hal yang sangat penting, namun kerangka pemikiran itu tidak akan berarti tanpa dilengkapi proyek-proyek kecil yang akan mengisinya. Pembangunan demokrasi adalah proyek besar dengan komponen yang sangat banyak dan kompleks, yang memerlukan visi berskala makro. Namun visi berskala makro tidak lebih dari rancangan umum. Perwujudannya akan sangat tergantung pada proyek-proyek berskala kecil yang menangani komponen-komponennya yang sangat banyak dan rumit.

Dalam pemikiran pascamodern, arah proses perubahan bisa berasal dari titik manapun dalam tubuh masyarakat. Proses itu bisa mulai dari hal-hal kecil menuju hal-hal yang besar. Jadi arah proses pembangunan demokrasi tidak harus selalu dari skala makro, tetapi juga bisa dari arah mikro. Tidak harus dimulai dari gedung MPR, tetapi dari kampus atau lingkungan sosial terkecil. Kampus bisa dijadikan pilot demokrasi dan masyarakat madani bukan hanya tempat untuk berwacana tentang mereka, tetapi sebagai tempat untuk mempraktekkan dan mewujudkan mereka. Kalangan akademisi sendiri yang akan menciptakan wacana tentang demokrasi proyek pilot di kampus dan yang akan bekerja mewujudkan demokrasi dan masyarakat madani dalam proyek pilot skala kecil ini. Ini akan menjadi proyek yang akan jauh lebih sulit dan jauh lebih menantang bagi kalangan kampus daripada sekedar menuntut orang lain untuk "membuatkan" demokrasi untuk mereka. Oleh karena itu, meskipun terbayang kemungkinan proyek itu berhasil dan bisa dibanggakan serta ditularkan ke tempat lain yang terdekat, untuk sementara cukuplah diangan-angankan dulu.

DAFTAR ACUAN

- Callinicos, Alex (1990), *Against Postmodernism: A Marxist Critique*. New York: St. Martin's Press.
- Eagleton, Terry (1985), "Capitalism, Modernism and Postmodernism," *New Left Review*, 152 60–73.
- Foster, Hal, (ed.) (1983), *The Anti Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*. Seattle: Bay Press.

- Foucault, Michel (c. 1977), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (terj. Alan Sheridan). New York: Pantheon Books.
- (c. 1980) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972 – 1977*. (terj dan ed. Colin Gordon). New York: Pantheon Books
- Hassan, Ihab (1987), *The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture*. Columbus: Ohio State University Press.
- Hayles, N. Katherine (1990), *Chaos Bound, Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Horkheimer, Max dan Theodore W. Adorno (1982), "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception" dalam *Dialectic of Enlightenmen* (terj. John Cumming) New York: Continuum, 120 – 167.
- Jay, Martin (c. 1984), *Epilogue: The Challenge of Poststructuralism, Marxism and Totality: The Adventures of a Concept from Lukacs to Habermas*. Berkeley: The University of California Press, h. 515 – 537.
- (1973), *Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923 – 50*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company
- Jencks, Charles (1986), *What is Postmodernism?* London: Academy Editions; New York: St. Martin Press.
- Lyotard, Jean-Francois (1988), *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Marcuse, Herbert (1964), *One Dimensional Man: Studies in the Ideologies of Advanced Industrial Society*. Boston: Beacon Press.
- Megill, Allan (c. 1985), *Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida*. Berkeley: University of California Press.
- Ryan, Michael (1984), *Marxism and Deconstruction: A Critical Articulation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Said, Edward (1978), "The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions," *Critical Inquiry*, 4, h. 673 – 714.
- Smith, Henry N. (1950), *Virgin Land: The American West as Symbol and Myth*. Cambridge: Harvard University Press.